

Implementasi Wawasan Nusantara dalam Tata Kelola Desa



Meta Deskripsi: Implementasi Wawasan Nusantara dalam tata kelola desa merupakan upaya memperkuat persatuan, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan melalui pemerintahan desa yang berlandaskan nilai kebangsaan, gotong royong, dan keadilan sosial.

Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks pembangunan nasional, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek utama yang menentukan arah kemajuan bangsa dari akar rumput. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara pandang yang menyeluruh dan berlandaskan nilai kebangsaan dalam mengelola pemerintahan desa.

Salah satu landasan penting tersebut adalah **Wawasan Nusantara**, yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan wilayah, bangsa, dan negara. Implementasi Wawasan Nusantara dalam tata kelola desa menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan desa yang inklusif, adil, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada persatuan dan kesejahteraan masyarakat.

Latar Belakang Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara lahir dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, beragam suku, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa, namun juga berpotensi menimbulkan perpecahan apabila tidak dikelola dengan baik.

Dalam sejarahnya, Wawasan Nusantara dikembangkan sebagai konsep geopolitik Indonesia untuk menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia—darat, laut, dan udara—merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak

terpisahkan. Konsep ini kemudian berkembang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengertian Wawasan Nusantara

Secara umum, **Wawasan Nusantara** adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam konteks pemerintahan desa, Wawasan Nusantara dimaknai sebagai:

- Cara pandang pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola desa sebagai bagian integral dari NKRI
- Kesadaran kolektif bahwa kepentingan desa harus sejalan dengan kepentingan nasional
- Sikap menghargai keberagaman sosial, budaya, dan kearifan lokal dalam bingkai persatuan

Tujuan Wawasan Nusantara

Penerapan Wawasan Nusantara memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. **Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;** Dengan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan atau individu.
2. **Menumbuhkan rasa cinta tanah air;** Melalui pemahaman bahwa desa merupakan bagian penting dari kedaulatan negara.
3. **Menciptakan pemerintahan yang adil dan merata;** Tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, budaya, atau ekonomi.
4. **Mendorong pembangunan berkelanjutan dari desa;** Yang selaras dengan visi pembangunan nasional.

Manfaat Wawasan Nusantara dalam Tata Kelola Desa

Implementasi Wawasan Nusantara memberikan berbagai manfaat nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di antaranya:

- **Meningkatkan kualitas tata kelola desa** yang transparan, partisipatif, dan akuntabel
- **Memperkuat kohesi sosial masyarakat desa** di tengah keberagaman
- **Mencegah konflik horizontal** melalui pendekatan musyawarah dan gotong royong
- **Mengoptimalkan potensi desa** dengan tetap menjaga kepentingan bersama
- **Membangun kesadaran hukum dan kebangsaan masyarakat desa**

Implementasi Wawasan Nusantara dalam Sistem Tata Kelola Desa

Penerapan Wawasan Nusantara dalam tata kelola desa dapat diwujudkan melalui berbagai aspek berikut:

1. Pemerintahan Desa yang Inklusif

Pemerintah desa harus memberikan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Musyawarah desa menjadi instrumen utama dalam pengambilan keputusan.

2. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa harus mengedepankan kepentingan bersama, memperhatikan pemerataan, dan berorientasi pada keberlanjutan, sejalan dengan arah pembangunan daerah dan nasional.

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Dana Desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Prinsip Wawasan Nusantara menuntut agar anggaran desa digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan kelompok tertentu.

4. Pelestarian Nilai Budaya dan Kearifan Lokal

Budaya lokal dijaga dan dikembangkan sebagai identitas desa, namun tetap terbuka terhadap nilai kebangsaan dan kemajuan zaman.

5. Ketahanan Sosial dan Keamanan Desa

Sinergi antara pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjadi wujud nyata kesadaran akan pentingnya stabilitas nasional dari tingkat desa.

Dampak Implementasi Wawasan Nusantara dalam Tata Kelola Desa

Implementasi Wawasan Nusantara secara konsisten akan membawa dampak positif, antara lain:

- **Terwujudnya desa yang harmonis dan toleran**
- **Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa**
- **Pembangunan desa yang merata dan berkeadilan**
- **Menguatnya identitas kebangsaan di tingkat lokal**
- **Desa menjadi benteng persatuan dan kesatuan bangsa**

Penutup

Wawasan Nusantara bukan sekadar konsep kebangsaan, melainkan pedoman praktis dalam membangun tata kelola desa yang berkeadilan, partisipatif, dan berorientasi pada persatuan. Dengan menjadikan Wawasan Nusantara sebagai landasan berpikir dan bertindak, desa tidak hanya menjadi pusat pembangunan, tetapi juga penjaga nilai-nilai kebangsaan.

Melalui implementasi Wawasan Nusantara dalam tata kelola desa, diharapkan terwujud desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus tetap kokoh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.